

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

- Aminuddin Ilmar, 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana PrenadaMedia Grup.
- Abdul R. Saliman, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana PrenadaMedia Grup.
- Barney, J.B. and Ouchi, WG. 1989. *Organization Economic*. Jossey-Bass Publishers.
- Budi Untung 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Andi Offset.
- Ediwarman, 2009. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Edisi Perbaikan Ke-II.
- Humberto R. Maturana and Fransisco J Varela, 1981. *Autopoiesis and Cognition The Realization of Living*, D. Reidel Publishing Company. Dordrecht : Holland / Boston : U.S.A. London : England
- I Made Arya Utama ,N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge yang disunting Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*.1993.
- Laurence M. Friedman, 1975 . *The Legal System* : A Social Science Perpective, New York : Russel sage Foundation.
- Lon L .Fuller, 1971: 39-91, *The Morality of Law* . The New Haven, Connecticut: Yale University Press. 1964. Pp. viii, 202.
- Moleong, J. Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge, Philipus M. Hadjon, 1993 . *Pengantar Hukum Perizinan* : Yurika
- Ningrum Natasya Sirait, 2011 . *Hukum Persaingan Di Indonesia*.
- Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta.

- R.P. Suyono, 2005. Shipping : *Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*, Jakarta : PPM Sekolah Tinggi Manajemen. Aryga Putra.
- Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif*, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rudhi Prasetya, 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, menurut U.U No 1 Tahun 1995. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dn Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1995. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Surya Brata, Sumadi, 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2002. *Prinsip izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yosvita Prasetyaningtyas, 2014. *Hukum Untuk Awam*. Efata Publishing.

B. Makalah/Laporan dan Jurnal

- Blog Bisnis dan Keuangan and tagged BOT, “*Build Operate Transfer*”. Bookmark the permalink.
- Bagir Manan, 2005. Makalah dengan judul “*Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*”, Yogyakarta : FH UII Press.
- Ernst dan Pham, 1994, Posted on Desember 15, 2010 by mustafit blog, <http://mustafit.wordpress.com/2010/12/15/skema-build-operate-transfer/>
- Irene Aulia Hermanto Blog, 27 Maret 2012.” *Perekonomian Indonesia*”.
- Levy, 1996, Posted on Desember 15, 2010 by mustafit blog, <http://mustafit.wordpress.com/2010/12/15/skema-build-operate-transfer/>
- Laporan Persaingan Global (GCR) tahun 2006, peringkat : *Kualitas Infrastruktur Pelabuhan Indonesia*”.

Saut Gurning, 10 Mei 2011. Makalah dengan *Judul Orientasi dan Kebijakan Maritim di Indonesia*,

Ridwan HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Cetakan Kedua Yogyakarta,

Umar Haris, Kepala Biro Hukum dan KLSN Kementerian Perhubungan 2014. **“Privatisasi. Konsesi BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum Kepelabuhanan”**.

Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Concession>.

PT Pelindo I (Sejarah PT Pelabuhan Indonesia I)

Maruarar Siahaan, 17 Maret 2011. **“Pendapat ahli dalam pengujian pasal 90 (3) huruf g Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap UUD 1945 “**.

Nuryanto : *“Peluang dan Hambatan”*, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, dari Pengelola Pelabuhan ke Operator Terminal :, Jurnal Saintes Maritim”.

Pieter Batti, 17 Juni 2011. *“Masalah dalam Penerapan UU Pelayaran”* hukumonline.com,

C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58, dan 59 Tahun 1991 tentang Pendirian PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

Keputusan Menteri Perhubungan No KP.414/2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Surat Menteri Perhubungan Nomor : HK 003/1/11 Phb 2011 Perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran Terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero).

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pemberian Konsesi Dan Bentuk Lainnya Dalam Pengusahaan Di Pelabuhan (Oleh Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan Kepada Badan Usaha Pelabuhan, Penyedia Jasa Terkait Dengan Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)

